

Berita Lingkungan Hidup

Investor Berupaya Pindahkan Komodo dari NTT ke Bali



P/Ruht Semiono

Aliansi Masyarakat Anti Tambang NTT berunjuk rasa di gedung ESDM, Jakarta, Selasa (4/8), mendesak kepada pemerintah untuk mencabut dan hentikan semua izin pertambangan dan tolak memindahkan Komodo ke Pulau Bali.

[JAKARTA] Aliansi Masyarakat Anti Tambang Nusa Tenggara Timur (NTT) mensinyalir, ada upaya sistematis dari beberapa pihak untuk menghilangkan komodo (*Varanus komodensis*) dari bumi NTT.

Upaya sistematis itu mulai dirasakan dengan adanya kebijakan dari Departemen Kehutanan yang akan memindahkan 10 ekor komodo dengan alasan penangkaran ke Pulau Bali.

Koordinator Aksi aliansi, Yohanes Christoporus Tara, di Jakarta, Rabu (5/8), mencurigai, Pulau Komodo, tempat biawak raksasa berada saat ini, akan diubah menjadi daerah pertambangan, mengingat daerah itu kaya akan bahan tambang, seperti emas.

Menurut Christoporus, pihaknya sudah menemui secara langsung pejabat dari Departemen Kehutanan, untuk mempertanyakan alasan penangkaran hewan langka tersebut ke Bali, dan jawaban yang diperoleh cukup mengagetkan. "Ternyata upaya penangkaran itu bukan program Departemen Kehutanan, tetapi permintaan investor," katanya.

Dikatakannya, investor yang berniat menangkarkan Komodo itu, selama ini bergerak di bidang pariwisata. Christoporus juga mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak jelas soal pariwisata di NTT.

Di satu sisi, katanya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan NTT sebagai tujuan wisata, apalagi Komodo saat ini diperjuangkan masuk menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

Kembalikan 4 Komodo

Namun di sisi lain, ada langkah-langkah dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang justru tidak sejalan dengan misi pariwisata, seperti upaya penangkaran Komodo di Bali dan pembukaan tambang di Manggarai Barat. Sementara itu, sebanyak empat ekor komodo yang kini berada di Taman Safari Gianyar, Bali, diminta dikembalikan ke habitatnya di Manggarai Barat, NTT. Komodo merupakan satwa langka, sehingga keberadaan satwa itu di luar habitatnya, mengkhianatkan kelangkaannya.

"Satwa purba ini merupakan kebanggaan masyarakat NTT dan dijadikan identitas kekayaan alam NTT dan dijadikan maskot daerah. Dengan demikian, satwa langka ini harus hidup di tempat asalnya," kata Wakil Gubernur NTT Esthon Leyloh Foenay di Kupang, Rabu (5/8) pagi.

Sementara itu, di Jakarta, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Tambang NTT berunjuk rasa di depan Istana Presiden, Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DPR, dan Kantor Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (4/8).

Mereka mendesak Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro untuk segera mencabut semua izin tambang di Pulau Flores, terutama di Batu Gosok, Kabupaten Manggarai Barat. Mereka juga mendesak Menteri Kehutanan MS Kaban agar membatalkan keputusannya memindahkan 10 ekor komodo dari Flores ke Taman Safari Bali hanya dengan alasan permurnian binatang purba kala itu.